

Article

Strategi Partai Sira Sebagai Partai Lokal Dalam Menghadapi Tantangan Pasca Pemilukada

Nofriadi¹, Naufal Islami^{2*}, Muhammad Alfarizzi³, Cut Rahel Amanda⁴, Maghfirah Izzani⁵, Tiara Anisa⁶
123456Universitas Syiah Kuala

*Correspondensi Penulis: islaminaufal651@gmail.com

Abstrack: *Political parties are one of the crucial instruments in the democratic system in Indonesia, the Independent Solidarity of the Aceh People (SIRA) party is a local political party in Aceh that faces political challenges after regional elections and general elections. The main focus in this paper is to understand the Independent Solidarity Party of the Aceh People (SIRA) how this party can maintain its name and expand its political influence in the highly competitive party system in Indonesia, with the political, mobilization, and communication approaches that have been carried out by the SIRA Party in the context of competition at the local political level post-conflict and post-Helsinki MoU. In this study, a qualitative approach was used with a case study method. The collection of research data was collected from the results of in-depth interviews with the Secretary General of the DPP of the SIRA Party, through field observations, and interviews. The results of the study found that the SIRA party uses various strategies by emphasizing more on strengthening young cadres, collaborating with regional elites. Although in the 2024 general election the SIRA party failed to get a seat in the DPRA because it focused on nominating regional heads, from this strategy it succeeded in giving the party chairman to become the deputy regent of Nagan Raya. The conclusion of this study is that the SIRA Party shows high adaptability through various strategies such as locally-based and community-based politics, but the SIRA Party also faces great challenges such as limitations in funding sources, low participation of the millennial generation and lack of use of digital technology. The limitation of this study lies in the limited scope of informants and has not met the perspectives of sympathizers or voters.*

Keywords: *SIRA Party, Political Strategy, Local Parties, Aceh Elections, Case Studies.*

Abstrak: Partai politik merupakan salah satu instrumen yang krusial dalam sistem demokrasi di Indonesia, partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA) merupakan partai politik lokal di Aceh yang menghadapi tantangan politik setelah pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Fokus utama dalam penulisan ini ialah memahami Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA) bagaimana partai ini bisa menjaga namanya dan dapat memperluas pengaruh politik dalam sistem kepartaian yang sangat kompetitif di Indonesia, dengan pendekatan politik, mobilisasi, dan komunikasi yang telah dijalankan oleh Partai SIRA dalam konteks persaingan pada tingkat politik lokal pasca konflik dan pasca MoU Helsinki. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data penelitian dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam Bersama Sekretaris Jendral DPP Partai SIRA, melalui observasi lapangan, dan wawancara. Hasil penelitian mendapatkan bahwa partai SIRA menggunakan berbagai strategi dengan cara lebih menekankan penguatan kader muda, melakukan kerja sama dengan elite daerah. Walaupun pada pemilihan umum 2024 partai SIRA gagal mendapatkan kursi di DPRA karena berfokus pada pencalonan kepala daerah, dari strategi tersebut berhasil memberikan ketua partai menjadi wakil bupati Nagan Raya. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwasanya Partai SIRA menampakkan adaptabilitas yang tinggi melalui berbagai strategi seperti politik yang berbasis lokal dan kemasyarakatan, akan tetapi Partai SIRA juga menghadapi tantangan yang besar seperti keterbatasan dalam sumber pendanaan, rendahnya partisipasi generasi milenial dan kurangnya dalam memanfaatkan teknologi digital. Keterbatasan pada penelitian ini ialah terletak pada cakupan informan yang terbatas dan belum memenuhi persepektif simpatisan atau pemilih.

Kata Kunci: Partai SIRA, strategi politik, partai lokal, pemilu Aceh, studi kasus.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo Jl.

Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi di Aceh dengan pemerintah pusat karena merasa diabaikan dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada masa kepemimpinan Soeharto banyak membuat rencana kerja pembangunan, akan tetapi sumber daya Aceh yang dieksploitasi sehingga rakyat Aceh merasa kecewa karena pemerintahan Soeharto tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat Aceh. Sumber daya Aceh diambil sehingga rakyat Aceh menentang pemerintahan pusat dan membentuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada saat konflik GAM menerapkan strategi Pajak Nanggroe dimana pengusaha atau perusahaan yang ada di Aceh memberikan pajak ke pihak GAM, dengan cara ini pihak GAM bisa membuat ekonomi rakyatnya stabil. Dana tersebut digunakan untuk biaya operasional konflik bersenjata dan untuk masyarakat sipil yang menjadi korban (Ridhwan dkk., 2015).

Hasan Tiro seorang yang aktif mencari dukungan terhadap Gerakan Aceh Merdeka, tuntutan tersebut disuarakan kepada para cendekiawan muda di Aceh pelabuhan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA). SIRA yang didirikan pada 4 Februari 1999 untuk mewujudkan keinginan rakyat Aceh yang ingin menentukan arah nasib daerah mereka sendiri (Nurpratiwi & Hanny, 2019).

Dari konflik tersebut diberlakukannya Undang-Undang No 18 tahun 2001 tentang pelaksanaan Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, dan diubah menjadi Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh merupakan hasil dari MoU yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hasil dari MoU Helsinki Aceh diberikan hak khusus untuk mengatur daerahnya sendiri di bawah pengawasan pemerintah pusat (Dahlan dkk., 2024).

Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA) merupakan salah satu partai politik lokal di Aceh yang tumbuh dari perjuangan Rakyat Aceh untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan. Partai SIRA resmi didirikan pada tahun 2007 bersamaan dengan Partai Aceh. Partai SIRA mempunyai asas Persaudaraan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Partai ini memiliki pendekatan pada kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih berfokus pada kalangan menengah ke bawah.

Penelitian tentang partai lokal yang berada di provinsi Aceh telah beberapa kali dilakukan penelitian, apalagi setelah penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005 sehingga memberi ruang eksistensi pada partai politik lokal dalam mewujudkan demokrasi Indonesia. Ada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Aspinall, 2009), dari penelitian tersebut terlihat lebih mendominasi Partai Aceh dan dinamika politik setelah konflik di Aceh selesai. Selanjutnya, penelitian lain yang dilakukan oleh (Kadir, 2014) mereka lebih menekankan pada struktur organisasi dan tantangan internal kepada partai lokal seperti partai SIRA.

Akan tetapi, terdapat kesenjangan mengenai kajian ini terhadap strategi adaptif yang diterapkan pada partai lokal salah satunya Partai SIRA ketika menghadapi segala dinamika politik setelah pemilu, di tengah munculnya banyak partai baru dan perubahan perilaku pada pemilih, khususnya pada generasi muda atau yang sering disebut gen Z. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada historis, legalitas, dan struktur internal partai tersebut, tanpa mendalami bagaimana partai menyusun cara politik mereka seperti digitalisasi kampanye, penguatan basis milenial, dan mengelola isu lokal.

Penelitian ini memberikan gambaran terbaru dalam beberapa hal utama. Pertama, fokus pada strategi Partai SIRA dalam menghadapi pemilihan umum pada tahun 2024 yang mengutamakan aliansi lokal, kader muda, dan strategi komunikasi yang berbasis identitas lokal. Kedua, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori strategi pemasaran politik (STP: Segmentasi, Targeting, Positioning) dalam konteks partai lokal yang belum digunakan secara menyeluruh oleh penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian terbaru ini tidak hanya memenuhi kekurangan studi sebelumnya yang kecil atau struktural, akan tetapi memberikan partisipasi kepada pengembangan strategi politik partai lokal yang ada di provinsi Aceh dalam konteks sistem demokrasi di Indonesia setelah konflik selesai di Aceh.

Secara historis, awal mula munculnya Partai SIRA ialah sebagai perjuangan rakyat Aceh yang ingin konflik di Aceh berakhir dan membangun Aceh yang lebih maju dan beradab sesuai dengan

Syari'at Islam, sehingga masyarakat Aceh memperjuangkan aspirasi mereka secara damai dan demokratis. Partai SIRA adalah bagian dari pergerakan Aceh sehingga mencapai perdamaian, partai ini sebagian besar terdiri dari para aktivis pergerakan Referendum.

Semasa konflik Aceh, selain dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) juga ada pergerakan sipil yaitu yang tergabung ke dalam SIRA. Sebenarnya tujuan kedua gerakan ini sama, jika GAM menggunakan gencatan senjata akan tetapi SIRA (Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh) menggunakan gerakan sipil. Setelah konflik selesai Partai SIRA ikut bergerak dalam Pembangunan untuk membangun Aceh dan mensejahterakan rakyat Aceh.

Strategi Partai SIRA sebagai partai baru dalam menghadapi tantangan pasca pemilu berfokus pada penguatan citra partai, Partai SIRA memiliki kader yang kuat di beberapa daerah sehingga mereka juga berusaha meningkatkan nama partai sehingga banyak dikenal oleh segala kalangan masyarakat Aceh. Partai SIRA juga mengandalkan program yang mencakup pada kesejahteraan rakyat Aceh. Pada tahun 2019 SIRA mendapatkan kursi di DPRA, akan tetapi pada tahun 2024 Partai SIRA tidak mendapatkan kursi di DPRA dikarenakan perubahan politik karena calon yang ingin diusulkan berfokus pada kemenangan sebagai bupati sehingga para calon tersebut harus mundur untuk bertarung di kursi DPR sehingga Partai SIRA berfokus pada kemenangan bupati. Dari fokus partai ini menghasilkan sebuah kemenangan dimana ketua Partai SIRA terpilih menjadi wakil bupati di Nagan Raya. Pada awalnya beliau maju pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh akan tetapi tidak mendapatkan kursi, akan tetapi beliau menang sebagai wakil bupati.

Hal inilah yang menjadi salah satu fokus Partai SIRA dalam menggapai sebuah kemenangan, salah satu keunggulan Partai mereka ini ialah memiliki banyak kader yang kuat di beberapa daerah salah satunya di Nagan Raya. Sehingga partai ini mendapatkan hasil dari jerih payah mereka bertarung di masa pemilu.

TINJAUAN PUSTAKA

Partai Politik Lokal

Partai politik lokal di Aceh, seperti Partai SIRA memiliki karakteristik yang khas yang dipengaruhi oleh konteks historis konflik dan pemberian otonomi khusus. Menurut (Hidayatuddin & Jamba, 2024), partai-partai local berfungsi sebagai saluran representasi aspirasi masyarakat serta berperan signifikan dalam proses formulasi kebijakan publik di tingkat regional. Legalitas keberadaan partai local di Aceh sendiri bersumber dari kesepakatan dalam Nota Kesepahaman Helsinki tahun 2005, yang mengakomodasi partai-partai berorientasi local untuk berpartisipasi dalam kompetisi elektoral (Aspinall, 2009). Partai SIRA yang merupakan transformasi organisasi dari Gerakan Masyarakat SIRA (Sentral Independen Referendum Aceh), mengembangkan narasi-narasi berbasis kesejahteraan dan identitas kultural Aceh sebagai strategi mobilisasi dukungan politik (Nurpratiwi & Hanny, 2019)

Strategi Partai Politik

Strategi politik adalah rencana yang sistematis dan diterapkan untuk mencapai tujuan dalam meraih kekuasaan di bidang politik (Watoni & Puspitarini, 2022). Melalui strategi ini, partai politik dapat berhasil memenangkan kompetisi untuk kekuasaan dalam setiap kesempatan pemilihan umum. Maka dari itu, untuk tetap kompetitif menghadapi berbagai tantangan, Partai Sira perlu mengadaptasi strategi politik yang relevan dan adaptif. Strategi yang dirancang secara sistematis harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika sosial dan politik yang terus berubah. Setelah pemilihan usai, muncul tantangan baru seperti menjaga kepercayaan pemilih dan menanggapi isu-isu lokal yang berkembang. Oleh karena itu, strategi yang efektif sangat dibutuhkan, terutama yang mampu merespons kebutuhan dan karakteristik pemilih di setiap wilayah. Adaptasi yang tepat terhadap kondisi lapangan akan menjadi kunci bagi Partai Sira dalam mempertahankan eksistensinya di panggung politik.

Menurut Philip Kotler yang dikutip oleh (Haq dkk., 2022), strategi pemasaran adalah cara berpikir yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, yang mencakup target pasar, posisi produk, strategi pemasaran, dan anggaran yang dibutuhkan. menekankan bahwa keberhasilan strategi pemasaran bergantung pada pemahaman yang jelas tentang pasar dan perencanaan yang matang. Dalam politik, mengenali pemilih sasaran sama pentingnya dengan menentukan target konsumen dalam pemasaran. Memahami siapa mereka dan apa yang mereka inginkan jadi kunci. Partai juga perlu membangun citra yang khas, layaknya produk di pasar. Strategi kampanye seperti komunikasi dan

penggalangan dukungan pun serupa dengan promosi bisnis. Pengelolaan anggaran kampanye harus tepat agar rencana berjalan efektif. Jadi, prinsip pemasaran bisa diterapkan dalam politik untuk memenangkan pemilu

Strategi kampanye politik dapat dibagi ke dalam tiga pilar utama oleh Philip Kotler segmentasi, targeting, dan positioning (STP) yang dikutip oleh (Adhanurrizqi, 2022) . Segmentasi merupakan langkah awal yang bertujuan untuk mengenali dan mengelompokkan berbagai jenis pemilih berdasarkan karakteristik kebutuhan mereka. Setelah itu, targeting dilakukan dengan cara memilih kelompok pemilih tertentu yang dianggap paling strategis untuk dijadikan sasaran utama kampanye. Terakhir, positioning berfokus pada membentuk citra partai di benak masyarakat, misalnya dengan menampilkan partai sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang sedang dihadapi publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menggali secara mendalam strategi yang diterapkan oleh Partai SIRA sebagai partai baru dalam menghadapi tantangan politik pasca Pilkada dan Pemilu.

Kegiatan penelitian dilaksanakan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai SIRA yang terletak di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pengumpulan data dilakukan pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025. Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris DPP Partai SIRA. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan peran langsung dalam strategi partai yang menjadi fokus penelitian.

Tim peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang telah disusun sebelumnya. Teknik ini memungkinkan eksplorasi yang lebih luas terhadap informasi yang relevan, sambil tetap menjaga fokus pada topik utama penelitian. Selama wawancara, tim mencatat dan merekam percakapan dengan persetujuan dari informan guna memastikan ketepatan dalam pengolahan data. Selain itu, tim peneliti juga mendokumentasikan proses wawancara dalam bentuk foto sebagai bukti pendukung kegiatan penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah tim peneliti sendiri, yang secara aktif terlibat dalam proses pengumpulan hingga analisis data. Selain itu, pedoman wawancara berfungsi sebagai instrumen pendukung untuk menjaga konsistensi dan keterarahan dalam pengambilan data. peneliti juga mendokumentasikan proses wawancara dalam bentuk foto sebagai bukti pendukung kegiatan penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah tim peneliti sendiri, yang secara aktif terlibat dalam proses pengumpulan hingga analisis data. Selain itu, pedoman wawancara berfungsi sebagai instrumen pendukung untuk menjaga konsistensi dan keterarahan dalam pengambilan data. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan ini dilakukan secara berkesinambungan selama proses penelitian berlangsung hingga diperoleh hasil yang komprehensif dan sesuai dengan tujuan penelitian (Miles, 1994).

JENIS DATA

Bagian ini menjelaskan jenis data yang digunakan dalam penelitian. Data dapat berupa data kualitatif dan atau data kuantitatif. Jenis data dapat dikelompokkan ke dalam data primer dan/atau data sekunder.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif.

Tabel 1. Daftar Pengumpulan Data

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Muhammad Daud, SKM., M.Si	Sekjen DPP Partai Sira	1

ANALISIS DATA

Menerangkan uraian tentang model dan alat bantu statistik atau lainnya yang akan digunakan untuk menganalisis data atau menguji hipotesis yang telah diperoleh. Dalam penelitian kualitatif tidak ada pengujian hipotesis. Data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara

maupun dokumentasi dianalisis dengan menggunakan parameter yang telah dirumuskan dalam landasan teori/kerangka.

PEMBAHASAN

Partai Sebagai bukti hasil dari hak khusus yang diberikan kepada Aceh, maka terbentuknya beberapa partai politik lokal di Aceh, seperti beberapa partai politik lokal yang terdaftar pada pemilu 2024. Ada Partai Aceh (PA), Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Nanggroe Aceh, dan Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh.

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125). Berdasarkan aturan dalam Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 di atas, otonomi daerah jelas memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada setiap daerah. Otonomi daerah di Indonesia melalui prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan (Rifqinizamy, 2013).

Sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut bisa dikenal dengan istilah sistem pemerintahan "demokrasi". Demokrasi yang berasal dari kata-kata bahasa Yunani demos (rakyat) dan cratein (pemerintahan), artinya pemerintahan rakyat. Demokrasi diwujudkan dengan adanya pemerintahan yang bersendikan perwakilan rakyat, yang kekuasaan dan wewenangnya berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat, serta bertanggungjawab penuh kepada rakyat. Oleh karena itu, demokrasi mensyaratkan adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat tersebut yang harus diselenggarakan secara berkala dengan bebas, rahasia, jujur dan adil (Kodiman & Fatimah, 2023).

Merdeka (GAM) untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui struktur pemerintahan modern. Partai-partai lokal ini banyak diisi oleh mantan GAM dalam kepengurusannya sebagai bentuk aspirasi politik mereka. Keikutsertaan mantan GAM dalam pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi bukti bahwa dominasi mereka sangat kental dalam pemerintahan (Syahputra & Baiduri, 2018). MoU Helsinki tidak hanya menjadi titik akhir dari konflik bersenjata antara GAM dan Pemerintah Indonesia, tetapi juga membuka peluang baru bagi eks kombatan untuk berpartisipasi secara sah dalam politik melalui kanal demokrasi (Junaidi, dkk, 2022).

Selain Aceh, Papua juga merupakan daerah yang mendapatkan otonomi khusus. Di Aceh, partai lokal merupakan hasil dari otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sementara di Papua, meskipun memiliki status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, regulasi mengenai partai politik lokal belum sejelas di Aceh (Musrafiyan, dkk, 2022).

Salah satu partai yang sudah berdiri sejak awal diberlakukan kebijakan khusus ini adalah Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA). Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA) memiliki akar sejarah yang mendalam dalam dinamika politik Aceh modern. Partai SIRA berakar dari konflik panjang yang melanda Aceh. Berawal dari dinamika perjuangan masyarakat Aceh dilatarbelakangi oleh aspirasi kolektif untuk mewujudkan kemajuan meliputi aspek peradaban, keadilan sosial, nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian berkelanjutan, kebebasan berbasis nilai Islam, serta penguatan kearifan lokal. Berdasarkan konteks historis tersebut, kemudian terbentuklah organisasi masyarakat sipil bernama Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) pada tanggal 4 Februari 1999, yang berperan sebagai wadah perjuangan damai selama bertahun-tahun. Selanjutnya, pada tanggal 15 Agustus 2005, tercapai suatu konsensus politik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai pihak-pihak utama dalam konflik Aceh, yang kemudian sepakat untuk berkomitmen pada penyelesaian konflik secara damai dan saling menghormati (Tempo, 2023)

Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA) lahir dari perjuangan panjang seluruh rakyat Aceh yang menuntut keadilan dan kesejahteraan. Pembentukan Partai SIRA diinisiasi oleh para tokoh aktivis sipil organisasi Sentral Informasi Referendum Aceh tahun 1999 (Kumparan, 2021). Partai SIRA diproklamasikan di Banda Aceh pada 10 Desember 2007 bertepatan dengan hari HAM Dunia (Kumparan, 2021). Partai SIRA mempunyai kepanjangan Partai Suara Independen Rakyat Aceh. Pada kongres II diubah menjadi Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh.

Keberadaan partai politik lokal di Indonesia bukanlah hal baru. Partai politik lokal di Aceh menjadi penanda bahwa partai politik lokal dapat eksis dalam mengawal penyelenggaraan otonomi

khusus di Pemerintahan Aceh. Kelahiran Partai Politik Lokal di Aceh didasarkan pada perjanjian perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui perjanjian Helsinki (MoU Helsinki). MoU Helsinki memberikan mandat untuk merumuskan peraturan perundang-undangan baru bagi Pemerintahan Aceh (Andriyansyah, 2020).

Partai SIRA merupakan salah satu partai politik lokal di Provinsi Aceh yang memiliki akar historis dalam gerakan masyarakat sipil. Partai ini bertransformasi dari sebuah organisasi non-pemerintahan bernama *Sentral Informasi Referendum Aceh* (SIRA), yang dibentuk pada tahun 1999 sebagai respon terhadap ketidakadilan dan konflik berkepanjangan di Aceh. Tujuan utama dari gerakan ini pada awalnya adalah mengadvokasi hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Aceh melalui mekanisme referendum yang damai dan demokratis. Setelah tercapainya Nota Kesepahaman Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005, muncul ruang politik yang memungkinkan pendirian partai-partai lokal di Aceh. Momentum ini dimanfaatkan oleh para aktor sipil di lingkungan SIRA untuk mendirikan partai politik yang sah secara hukum. Maka pada 10 Desember 2007, SIRA bertransformasi menjadi Partai Suara Independen Rakyat Aceh, yang kemudian pada tahun 2012 mengalami perubahan nomenklatur menjadi Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh, sebagai bentuk konsolidasi identitas politik yang lebih inklusif dan strategis.

Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA) memiliki visi yang mencerminkan komitmen ideologis partai terhadap perjuangan sosial, politik, dan budaya yang berakar dari sejarah panjang Aceh sebagai entitas yang memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi tersebut menekankan pada pentingnya mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pembangunan daerah yang berpihak pada nilai-nilai lokal dan kedaulatan rakyat. Dalam rangka merealisasikan visi tersebut, Partai SIRA merumuskan misi strategis yang mencakup empat aspek utama. Pertama, memperkuat pelaksanaan otonomi khusus Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), dengan menempatkan rakyat Aceh sebagai subjek utama dalam proses pengambilan keputusan politik dan pembangunan.

Kedua, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang merata, adil, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan karakteristik geografis dan sosiokultural masyarakat Aceh. Ketiga, Partai SIRA berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat, budaya, dan identitas Aceh sebagai bagian internal dari peradaban lokal yang memiliki kontribusi terhadap kebhinekaan nasional. Keempat, partai ini menempatkan partisipasi publik sebagai prinsip dasar dalam demokrasi, khususnya dengan mendorong keterlibatan generasi muda dan kelompok marjinal dalam proses politik, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif.

Partai SIRA telah beberapa kali mengikuti kontestasi elektoral di Aceh. Pada Pemilu 2009, partai ini memperoleh 38.157 suara (sekitar 1,78% dari total suara di Aceh), namun belum berhasil memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pada pemilu 2014 Partai SIRA tidak mengikuti kontestasi, namun pada pemilu 2019 Partai SIRA kembali mengikuti kontestasi dan berhasil memperoleh satu kursi di DPRA, menandakan eksistensinya masih memiliki resonansi elektoral di tengah masyarakat.

Dalam rangka memperkuat posisi tawarnya di Pemilu 2024, Partai SIRA tergabung dalam koalisi Aceh Maju, yang terdiri dari aliansi partai nasional dan lokal. Strategi ini mencerminkan pendekatan pragmatis dan kolaboratif dalam upaya mengoptimalkan capaian elektoral serta memperluas basis dukungan politik di Aceh.

Secara sistematis, Partai SIRA yang memiliki sejarah panjang sebagai representasi gerakan sipil, ternyata tidak menunjukkan perkembangan signifikan dalam kinerja elektoral maupun penguatan struktur internal pasca mengikuti tiga pemilihan umum (Putri, 2024). Setelah mengikuti tiga pemilu, perkembangan suara dan kursinya relatif stagnan, menunjukkan basis dukungan yang lemah.

Dalam implementasinya, partai lokal menghadapi berbagai tantangan struktural dan politik, diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, lemahnya kaderisasi internal, serta kurangnya dukungan kelembagaan yang stabil. Hal ini menyebabkan partai lokal seperti Partai SIRA kesulitan untuk berperan efektif dalam sistem demokrasi elektoral, meskipun memiliki basis legalitas yang kuat (Wijayanti & Iswandi, 2022).

Kemenangan Partai SIRA

Tabel 2. Kemenangan Partai SIRA dalam Pemilu (2009-2024)

Tahun Pemilu	Status Partisipasi	Hasil Dpra (Provinsi)	Hasil DPRK (Kabupaten/Kota)	Keterangan
2009	Mengikuti	Tidak Memperoleh Kursi	Tidak Memperoleh Kursi	Mendapat 38.157 suara (1,78%); tidak lolos ambang batas
2014	Tidak Berpartisipasi	-	-	Tidak memenuhi syarat administratif
2019	Mengikuti	1 Kursi	4 Kursi	Kembali aktif setelah vakum; memperoleh 1 kursi DPRA
2024	Mengikuti	5 Kursi (Klaim Internal)	30 Kursi (Klaim Internal)	Data berdasarkan perhitungan internal; menunggu hasil resmi KIP

Strategi Partai SIRA Dalam Menghadapi Pemilu dan Pilkada

Salah satu peran penting partai politik dalam mempertahankan kedudukannya pada kompetisi politik adalah dapat menerapkan strategi yang efektif. Sehingga bagaimana Partai Sira sebagai salah satu Partai lokal yang bersaing dengan partai lainnya menerapkan strategi yang menarik para pemilih. Strategi kampanye politik dapat dibagi ke dalam tiga pilar utama oleh Philip Kotler segmentasi, targeting, dan positioning (STP). Segmentasi merupakan langkah awal yang bertujuan untuk mengenali dan mengelompokkan berbagai jenis pemilih berdasarkan karakteristik kebutuhan mereka. Setelah itu, targeting dilakukan dengan cara memilih kelompok pemilih tertentu yang dianggap paling strategis untuk dijadikan sasaran utama kampanye. Terakhir, positioning berfokus pada membentuk citra partai di benak masyarakat, misalnya dengan menampilkan partai sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang sedang dihadapi publik. Pendekatan STP ini sangat krusial agar pesan-pesan politik dapat tersampaikan secara tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal kepada audiens yang diinginkan. Dengan munculnya beberapa partai baru juga akan memberikan penyesuaian strategi *branding politic* pada era ini. Parpol juga harus menggunakan dunia maya untuk memperkenalkan mengenai partai mereka (Barokah & Hertanto, 2022).

Menurut Gilad James, minimal ada tiga strategi politik yang umum dipakai oleh partai politik untuk memengaruhi para pemilih untuk kemudian mendapatkan kekuasaan politik yaitu: (1) aliansi, (2) negosiasi dan (3) lobi. Aliansi sama dengan istilah koalisi, yaitu melibatkan pembentukan kemitraan dengan individu maupun kelompok lain dengan minat yang sama. Partai politik dapat membentuk koalisi yang bertujuan untuk memenangkan pemilu. Negosiasi adalah salah satu strategi partai politik yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang secara kemanfaatan dapat menguntungkan keduanya. Adapun strategi melobi merupakan strategi yang ditujukan untuk melobi pejabat atau pemegang kekuasaan agar supaya partai politik yang bersangkutan dapat memperoleh kekuasaan (Tarisyah, 2024).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi politik adalah suatu perencanaan yang terstruktur dan dijalankan secara sistematis untuk meraih kekuasaan di ranah politik. Melalui penerapan strategi ini, partai politik memiliki peluang lebih besar untuk unggul dalam persaingan merebut kekuasaan, khususnya saat pemilu berlangsung. Pemanfaatan pendekatan ilmu pemasaran juga terbukti efektif dalam menarik simpati dan dukungan dari para pemilih. Oleh karena itu, marketing politik menjadi salah satu strategi kunci dalam upaya meraih kemenangan, karena mencakup berbagai dimensi yang memengaruhi keberhasilan kampanye.

Berdasarkan wawancara dengan Sekjen Partai Sira, Muhammad Daud MSI, strategi pasca-Pemilukada meliputi:

1. Penguatan Kader: Fokus pada rekrutmen kader muda (khususnya mahasiswa) dan pelatihan kepemimpinan untuk membangun basis yang berkelanjutan.
2. Aliansi Politik: Memanfaatkan kedekatan dengan pemerintah daerah (misalnya Gubernur Aceh) untuk memperluas pengaruh.

3. Advokasi Isu Lokal: Mengusung narasi berdasarkan visi misi "Aceh Berperadaban" untuk menarik dukungan berbasis identitas dan "pembangunan kesejahteraan lokal"
4. Mempersiapkan Kader dari Sekarang: Fokus merekrut kader muda (seperti mahasiswa) untuk memperkuat basis partai.
5. Tetap Optimis: Meski kursi terbatas, Partai Sira memiliki pengaruh di pemerintahan (misalnya, beberapa kadernya menjabat sebagai bupati dan staf gubernur).
6. Menjaga Eksistensi: Tidak goyah meski bersaing dengan partai nasional yang lebih besar.
7. Meluaskan fokus targeting: Sebelumnya partai sira hanya berfokus pada masyarakat kelas bawah sesuai isu yang mereka utamakan yaitu pembangunan kesejahteraan.

Sehingga keterkaitan strategi dari hasil wawancara dengan teori Philip Kotler mengenai 3 pilar utama dari strategi politik. Segmentasi membantu fokus pada pemilih potensial di tengah persaingan multipartai. Targeting memastikan efisiensi sumber daya terbatas. Positioning membangun citra unik sebagai partai lokal yang progresif dan akar rumput. Dengan pendekatan STP, Partai Sira membuktikan bahwa dalam politik, bukan selalu yang besar yang menang - tapi yang paling tepat strateginya. Pemilu 2029 akan menjadi ujian apakah formula ini bisa mengantarkan partai kecil ini menjadi pemain baru yang diperhitungkan. "Kami mungkin kecil, tapi fokus kami tajam," Muhammad Daud. "Inilah kekuatan kami."

Terlepas dari hal tersebut tentunya Partai Sira memiliki kendala atau tantangan yang di hadapi. Berdasarkan wawancara dengan Sekjen Partai Sira, Muhammad Daud MSI, tantangan pasca-Pemilu meliputi:

1. Persaingan Ketat: Maraknya partai baru (lokal/nasional) di Aceh pasca-putusan MK tentang parliamentary threshold.
2. Keterbatasan Sumber Daya Finansial: Tidak menerima hibah dana dari pemerintah pusat (hanya dapat bantuan jika dapat kursi DPRA).
3. Minimnya kader berkualitas dan kesulitan merekrut caleg.
4. Fragmentasi Suara: Pemilih Aceh terpecah antara partai lokal (Sira, Aceh, PDA, dll.) dan partai nasional.

Keterbatasan sumber daya kampanye digital: Pasif dalam berkampanye untuk menarik minat pemilih muda melalui digital seperti website informasi, sosial media seperti Instagram, tiktok dan sebagainya.

PENUTUP

Kesimpulan

Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (Partai SIRA) adalah partai politik daerah yang terbentuk dari perjuangan panjang masyarakat Aceh untuk meraih keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian setelah masa konflik yang lama. Partai ini secara resmi berdiri pada tahun 2007 oleh para aktivis Sentral Informasi Referendum Aceh, dengan nilai-nilai dasar persaudaraan, kerakyatan, dan keadilan sosial, serta fokus pada peningkatan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Partai SIRA menempuh pendekatan damai dan demokratis dalam membangun Aceh yang beradab dan sesuai dengan syariat Islam.

Dalam menghadapi situasi politik pasca pemilu, Partai SIRA menerapkan strategi memperkuat citra dan memperluas pengaruh melalui kader-kader yang memiliki basis kuat di beberapa wilayah, terutama di Nagan Raya. Walaupun pada Pemilu 2024 partai ini gagal meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) karena mengutamakan pencalonan kepala daerah, strategi tersebut berhasil membawa ketua partai menjadi wakil bupati di Nagan Raya. Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan Partai SIRA dalam menyesuaikan strategi politiknya agar tetap berperan aktif dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui jalur pemerintahan daerah.

Namun, pada tahun 2024, Partai SIRA menghadapi kelemahan berupa kurangnya penetrasi ke kalangan generasi muda atau Gen Z serta minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam strategi politiknya. Secara keseluruhan, Partai SIRA menggambarkan transformasi dari gerakan sipil menjadi partai politik lokal yang aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah dengan komitmen pada perdamaian, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat Aceh.

SARAN

Adapun saran maupun rekomendasi praktis kepada Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (Partai SIRA) dimana partai perlu memperkuat beberapa program seperti program pendidikan politik

untuk anggota dan masyarakat melalui seminar dan pelatihan kepemimpinan yang berfokus pada pemahaman sistem politik khususnya di Aceh dan partisipasi aktif dalam demokrasi. Selain itu, meningkatkan pemanfaatan media sosial maupun platform digital sangat penting, guna memberikan informasi juga menjangkau pemilih dengan lebih mudah. Meningkatkan rekrutmen kader muda, terutama dari kalangan mahasiswa, tentunya dengan disertai mentorship dan pelatihan leadership. Menambahkan isu-isu yang relevan dengan kepentingan masyarakat Aceh yang dapat menarik perhatian pemilih. Kemudian yang terakhir ialah evaluasi terhadap strategi politik dan kampanye untuk kedepan dalam bersaing dengan partai lainnya. Sehingga Partai SIRA dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan politik dan meningkatkan pengaruhnya di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhanurrisqi, N. (2022). Strategi Pemasaran Politik Pasangan Benyamin-Pilar Pada Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Andriyansyah, M. F. (2020). Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Aceh. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(1), 24-41.
- Aspinall, E. (2009). *Islam and nation: Separatist rebellion in Aceh, Indonesia*. Stanford University Press.
- Barokah, F., Maryanah, T., Darmastuti, A., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 1-13. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>
- Tarisya C. Y. (2024). "Strategi Partai Lokal dalam Merebut Suara Pemilih Pemula di Kota Banda Aceh." Universitas Ar-Raniry.
- Hidayatuddin, & Jamba, P. (2024). Peran partai politik terhadap pembentukan kebijakan publik. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(6), 9045-9057. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Haque, M. G., Iskandar, A. S., Erlangga, H., & Sunarsi, D. (2022). Strategi pemasaran: Konsep, teori dan implementasi.
- Junaidi, A., Ruhdiara, & Fatimah, S. (2022). Demokrasi Lokal dalam Bingkai Pilkada di Aceh Pasca MoU Helsinki. *Community: Pengawas Diamika Sosial*, 8(2), 162-173.
- Kumpanan. (2021). *Profil Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh), Sejarah dan Visi Misinya*. Diakses pada 19 April 2025, dari <https://kumpanan.com/berita-terkini/profil-partai-sira-soliditas-independen-rakyat-aceh-sejarah-dan-visi-misinya-229U8SlxIaQ/2>
- Kadir, A. G. (2014). DINAMIKA PARTAI POLITIK DI INDONESIA. *Sosiohumaniora*, 16(2), 132-136. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5724/3037>
- Kodiman, A., & Fatimah, S. (2023). Urgensi dan peran partai politik dalam pembangunan masyarakat madani di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 85-88. Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Musrafiyan, M., Fahmi, M., & Karim, Z. P. (2021). Partai Politik Lokal di Daerah Otonomi Khusus:

- Perbandingan Yuridis Aceh dan Papua. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pradata Sosial*, 6(2), 179-193.
- Nurpratiwi, H., & Hanny. (2019). Dinamika konflik dan perdamaian Aceh. *Jambura History and Culture Journal*, 1(2), 96-107.
- Putri, N. M. (2024). *MENAKAR PELEMBAGAAN PARTAI LOKAL DI ACEH PERIODE 2009-2024: PERBANDINGAN ANTARA PARTAI SIRA DAN PNA* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Rahman, D. A., Abu Bakar, M., Rizwan, M., Hidayat, B., & Muntasir. (2024). Otonomi daerah khusus Aceh: Jembatan menuju rekonsiliasi atau sumber ketegangan baru. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(3), 183-194.
- Ridhwan, M., Fauzi, & Daud, S. (2015). *Transisi ekonomi politik GAM: Kajian arah pembangunan Gerakan Aceh Merdeka GAM*. *Fikiran Masyarakat*, 3(1), 88-96.
- Syahputra, I., & Baiduri, R. (2018). Eksistensi Partai Politik Lokal Pada Era Otonomi Khusus Aceh. *Jurnal Antropologi Sumatera*, 16(1), 1-6.
- Rifqinizamy, M. (2013). *Pembentukan Partai Politik Lokal di Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Tempo. (2023). *Mengenal Partai SIRA, Salah Satu Partai Lokal Aceh Di Pemilu 2024*. Diakses pada 19 April 2025, dari <https://www.tempo.co/pemilu/mengenal-partai-sira-salah-satu-partai-lokal-aceh-di-pemilu-2024-169175>
- Watoni, S., & Puspitarini, R. C. (2022). Strategi Partai Politik Baru: Studi Kasus Strategi Partai Politik Jaring Dukungan Masyarakat Kota Probolinggo. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(1), 4297-4306.
- Wijayanti, S. N., & Iswandi, K. (2022). Partai Politik Lokal Sebagai Upaya Perjuangan Identitas Politik Di Aceh. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11, 612-28.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai hasil MoU Helsinki.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.